**NOTULEN**

Nama Kegiatan : Workshop Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tradisonal

Tempat pertemuan : Hotel Royal Kuningan, Jakarta

Hari/Tanggal : Selasa - Rabu, 24 - 25 Juni, 08.00 WIB - Selesai

Agenda : Konsep Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tradisional

Pimpinan Rapat : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

Hari 1, Selasa

Tanggal, 24 Juni 2014

Peserta :

1. ............
2. .............
3. ................
4. .............
5. ............
6. ..............
7. ...............
8. ................
9. ...................

**Pembukaan oleh Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan mewakili Kepala Badan PPSDM Kesehatan.**

**Panel I**

1. **Penyajian Kepala Badan PPSDM Kesehatan diwakili oleh Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tentang Konsep Rancangan Pengembangan SDM Kesehatan Tradisional (dokumen terlampir)**
2. **Penyajian Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Alternatif dan Komplementer tentang Konsep Integrasi Kesehatan Tradisional Ke Dalam Sistem Kesehatan Nasional (dokuemn terlampir)**
3. **Diskusi**
4. Bapak dari Perguruan Tinggi (Airlangga)

* Ada pengobatan yang berlatar belakang keagamaan dan supranatural selain ramuan dan keterampilan, kalo tidak kita masuk dalam pembahasan kita pada kesempatan ini (dalam lingkup kemenkes) akan sangat disanyangkan.
* Perlu dipisah dan dibedakan antara ijin antar yang mendapat ijazah atau sertifikat dari pendidikan formal dan non formal.
* Keberadaan D III Batra di UNAIR atas permintaan Prof. Azrul (Kemenkes) setelah pulang dari luar negeri mendapatkan ide/gagasan adar Indonesia memiliki tenaga Batra yang dididik dengan pendidikan formal, kenapa lulusannya tidak jelas pendayagunaannya ?
* Perlu duduk bersama tingkat Kemenkes untuk membahas tentang penyediaan Sarpras tradkom, SDM tradkom, dan obat-obatan tradkom.

1. Ibu Akupuntur - UI

* Pengobatan tradkom akan sulit diintegrasikan dalam pengobatan komplementer karena terdapat perbedaan yang mencolok antara kedua model pengobatan tersebut

1. Bapak Poltekkes Surakarta

* Akupuntur belum meliki Bapak (koordinator) yang jelas sebagai induk
* Mengikuti KKNI yang sudah jelas pengaturan dan pembagiannya.
* Akademik tanpa profesi, larinya hanya akan sampai pada dosen atau peneliti, bukan sebagai tenaga yang diperbolehkan untuk berpraktek.
* Usulan : D III 🡪 digolongkan sebagai nakes, non D III 🡪 digolongkan dalam SDM Kes

1. Pak Dedi

* Rekomendasi SPA Kesehatan rekomendasinya tetap di Dinas Kesehatan sedangkan ijinnya dari dinas pariwisata dan tetap perlu ada Binwas terus menerus
* Pengobatan supranatural sudah masuk dalam kategori keterampilan, namun do’a-do’a tidak masuk ke dalam keterampilan.

1. Ibu Tari

* Pembahasan SDM Tradkom kita dibahas karena merupakan bagian dari PP yang sekarang hampir ditetapkan. Sehingga untuk ke depannya akan terus dikembangkan regulasi-regulasinya. Setelah regulasinya tersusun dan pendidikan formal tradkom sudah dibangun/diperkuat maka pembukaan formasi dari KemenPAN akan mengikuti sebagai bentuk pendayagunaannya.
* Pelatihan-pelatihan tradkom akan digiring ke pendidikan formal, baik yang belum, yang sedang pelatihan maupun yang telah pelatihan.

**Panel II**

1. **Penyajian Staf Ahli Menteri Bidang Teknokes dan Globalisasi (Prof. Agus P.) tentang Kebijakan Kesehatan Tradisional dalam Sistem Kesehatan Nasional (dokumen terlampir)**
2. **Penyajian Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan ....... (Dikbud), Alternatif dan Komplementer tentang Kebijakan Perijinan Pendirian Institusi Pelatihan (dokuemn terlampir)**
3. **Diskusi**
4. Bapak Direktur Poltekkes Surakarta

* Kenapa kita tidak maju-maju ?, salah siapa ?, mungkin perlu dijelaskan master drivernya ada di mana ?. kemenkes dan kemendikbud sama-sama mengelola SDM Kesehatan terkait tradkom.

1. Ibu Yanti

* Terkait persyaratan teknis, apakah kemendikbud telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait dalam memberikan rekomendasi maupun perijinan kepada profesi tradkom ?
* Sebaiknya ada koordinasi ke depannya nanti.

1. Prof Agus

* BPPSDMK harus membuat/memiliki sebuah strategi dalam berkoordinasi dengan kemendikbud dalam hal SDM Kesehatan
* Perlu pemetaan kebutuhan fasyankes tradkom secara nasional
* Perlu pemetaan kebutuhan fasyandik tradkom secara nasional
* Apabila yang menjadi vocal pembahasan tentang kesehatan, maka perlu dilakukan pemetaan fasyankes tradkom terlebih dahulu sehingga berikutnya adalah pemetaan fasyandik tradkom berdasarkan kebutuhan peningkatan kesehatan.
* Kalau kita saling berebut, maka tunggulah kehancurannya.
* Master drive nya dimulai dari Bina Pelayanan Tradkom, kemudian ke Pusren-Gun SDMK, selanjutnya ke ....

1. Pak Dikbud

* Kemendikbud menjalankan kegiatan sesuai dengan tupoksi, walaupun kadang bersinggungan maupun berhubungan dengan tupoksi kemenkes, apabila terdapat hubungan/singgungan tersebut maka memang akan dilakukan koordinasi, sehingga apabila terdapat hal-hal yang per dirubah/dilengkapi maka akan direvisi.
* Pembentukan instansi pelatihan dan kursus tergantung dari adanya permohonan yang selama ini permohonan berasal dari kalangan nakertrans atau pariwisata.
* Ijin praktek merupakan ranah kemenkes, kemendikbud hanya menyediakan SDM sesuai kurikulumnya.
* Pada saat penyusunan kebijakan terkait pelatihan/kursus tradkom, kemendikbud sering mengundang Bina Pelayanan Tradkom an Ibu Agnes yang sering berkontribusi dalam kegiatan tersebut.
* BAN PT 🡪 Perguruan Tinggi, BAN PNF 🡪 Pendidikan non Formal, BAN SM 🡪 Sekolah dan Madrasah
* D II bisa saja berkembang menjadi S 3, tetap harus mengikuti/memenuhi prosedur dan persyaratan.

**Panel III**

1. **Penyajian Direktur Bina Pelayanan Tradkom tentang ................. (dokumen terlampir)**
2. **Penyajian Balitbangkes tentang ................. (dokuemn terlampir)**
3. **Diskusi**
4. Bapak Anang

* Dibuatkan matriks sebelum menyusun konsep dan draft NSPK terkait pengembangan dan pemberdayaan SDM Tradkom Kesehatan
* Dalam matriks memuat pengelompokan tempat praktik/pelayanan oleh nakes tradkom, dapat mengacu pada RPP yang sementara sedang disusun, yakni memuat fasyankestradkom, puskesmas dan rumah sakit.
* Ditentukan juga nakes dengan kualifikasi apa saja yang akan memberikan pelayanan/praktik di setiap fasilitas-fasilitas tersebut.
* .....

1. Ibu Ani HUKOR Kemenkes

* Penyusunan peraturan selama ini biasanya kami menyusun dimulai dari jenis pelayanan kesehatan kemudian fasilitas pelayanan kesehatannya
* Apakah arah kebijakan kita ini nakes kita yang ‘runrun’ akan dikembangkan ke mana ?
* Yang diatur dalam RPP minimal D III
* Yang menjadi temapt pelayanan tradkom yang diatur dalam RPP adalah : Fasyankestrad dan Fasyankes (puskesmas dan Rumah Sakit)

1. Bapak narasumber Balitbangkes

* ....

1. Bapak Poltekkes Surakarta

* ...

1. **Rencana Tindak Lanjut**
2. ...